



“Negeri Seribu Kubah”: Identitas Arsitektur Rokan Hilir dan Pengaruh Selera Penguasa pada Era Pascareformasi

Rizki Dwika Aprilian¹, Vebryan Rhamadana², Azwar³

¹ Klaster Sejarah, Teori, Arsitektur Vernakular & Pusaka, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

² Magister Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.

³ Magister Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.

| Diterima 15 Juni 2022 | Disetujui 5 Juli 2022 | Diterbitkan 30 September 2022 |

| DOI <http://doi.org/10.32315/jlbi.v11i3|178>

Abstrak

Pasca reformasi 1998, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang menimbulkan berbagai pemekaran wilayah administratif baru, baik di level provinsi maupun kota/kabupaten. Pemekaran ini mendorong setiap daerah baru untuk membentuk identitas dengan cara beragam, mulai dari membuat slogan hingga membangun gedung pemerintahan yang sesuai dengan citra daerah yang ingin ditampilkan. Salah satu daerah hasil desentralisasi tersebut adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis pada 1999. Dibandingkan empat wilayah eks Kerajaan Siak Sri Indrapura lainnya yang kental dengan kultur Melayu, Rokan Hilir justru menggunakan pendekatan berbeda dalam mencari identitas baru bagi wilayahnya dengan memilih referensi arsitektur asing berupa kubah untuk merepresentasikan identitas wilayahnya yang dinilai lekat dengan citra keislaman. Tulisan ini merupakan *narrative research* yang bertujuan untuk membahas proses pembangunan identitas arsitektur Rokan Hilir bertema Negeri Seribu Kubah sekaligus melihat keterhubungannya dengan kepemimpinan Bupati Annas Maamun (2006-2014) melalui perspektif *theory of practice* dari Pierre Bourdieu. Melalui studi kasus di Rokan Hilir, tulisan ini menyimpulkan bahwa pemilihan identitas arsitektur yang berkiblat pada arsitektur asing ini menunjukkan bahwa selera sang penguasa daerah sangat memegang peranan dalam membentuk identitas baru di suatu wilayah, tidak hanya di Rokan Hilir saja, tetapi juga di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Kata-kunci: desentralisasi, gedung pemerintahan, identitas arsitektur, identitas kota, Rokan Hilir

“The Land of a Thousand Domes”: The Architectural Identity of Rokan Hilir and the Influence of Ruler’s Taste in the Post-Reformation Era

Abstract

Indonesia adopted a decentralization following the 1998 Reformation, creating new administrative areas at the province and city/district levels. Each new territory is encouraged by this growth to develop its own identity through various strategies, such as creating slogans and building public structures that reflect the region’s image. Rokan Hilir Regency, which split out from Bengkalis Regency in 1999, is one of the regions that have flourished from this decentralization. Rokan Hilir takes a different approach to developing a new identity for its region than the four other regions of the ancient Siak Sri Indrapura Kingdom (which have Malay solid cultural origins). Rokan Hilir used a foreign architectural reference in the shape of a dome to reflect the region’s identity, which is thought to be intimately tied to Islamic iconography. Through the lens of Pierre Bourdieu’s theory of practice, this narrative research analyzes the development of architectural identity in Rokan Hilir with the concept of “the Land of a Thousand Domes” and its relationship to the reign of Regent Annas Maamun (2006–2014). According to this paper’s conclusion, implementing a foreign-architectural-based identity indicates that regional rulers’ preferences are fundamental in shaping a new identity for an area in Rokan Hilir also several other regions in Indonesia.

Keywords: decentralization, government building, architecture identity, city identity, Rokan Hilir

Kontak Penulis

Rizki Dwika Aprilian

Klaster Sejarah, Teori, Arsitektur Vernakular & Pusaka, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Kampus Universitas Indonesia, Depok-Jawa Barat. Kode Pos 16424

E-mail: rizki.dwika@ui.ac.id



Copyright ©2022. Rizki Dwika Aprilian

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Pendahuluan

Lengsernya Presiden Soeharto melalui peristiwa Reformasi 1998 menandai adanya pembabakan baru dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia, salah satunya dengan lahirnya kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah. Melalui desentralisasi, kewenangan, keputusan, dan kebijakan yang semula terpusat di Jakarta kini disebar ke pemerintah daerah masing-masing, sehingga setiap daerah memiliki keleluasaan dalam mengembangkan wilayahnya sendiri, termasuk dalam hal menentukan identitas kewilayahan yang akan mereka usung. Jika pada masa Orde Baru cenderung menekankan pada lokalitas atau ekspresi lokal yang diinisiasi oleh keputusan pimpinan di tingkat pusat, maka di era pascareformasi, pemerintah daerah memiliki peran proaktif dalam menentukan sendiri seperti apa daerahnya akan dibangun [1].

Pada era sebelum reformasi, arsitektur yang mengangkat identitas setempat tidak hanya dinikmati oleh para arsitek dan budayawan saja. Regionalisme dipandang sebagai alat yang dapat digunakan oleh negara untuk menunjukkan jati diri yang muncul secara visual dan terkontrol di bawah narasi terpusat, dalam hal ini pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto [2]. Seiring dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah, fenomena politik identitas yang semakin menguat di ranah lokal [3]. Hal ini mengakibatkan munculnya sentimen kelokalan yang kemudian menjadi alat bagi pelaku politik di tingkat lokal untuk membangun monumen dan identitas arsitektur menurut narasi mereka sendiri.

Perayaan simbol-simbol kedaerahan menjadi identitas baru ini terjadi setidaknya melalui tiga cara, yakni: 1) hadir sebagai identitas baru yang menghilangkan atau mengubah identitas sebelumnya, 2) hadir dengan menumpang identitas yang sudah ada, atau 3) hadir sebagai identitas baru hasil jelmaan neoregionalisme yang kerap menggunakan arsitektur asing sebagai referensi utama dalam membentuk identitas baru (3). Rujukan arsitektur asing ini dapat dilihat sebagai perubahan *mindset*, dari yang awalnya poskolonialisme (nasionalisme) menjadi post-nasionalisme, yaitu etno-nasionalisme [4].

Identitas arsitektur merupakan bagian signifikan dari ekspresi kekuatan politik, mengingat arsitektur juga tidak terlepas dengan ekonomi, sosial-politik, seni, dan

teknologi yang menjadi satu [5], [6]. Melalui bahasa arsitektur seperti gaya, elemen fisik, maupun bentuk, pemegang kekuasaan dapat mengirimkan gagasannya untuk diekspresikan di ruang-ruang kota. Sebuah gedung, ruang kota, atau objek arsitektur bisa menjadi bahasa yang sarat pesan dan makna, sehingga keberadaannya dapat menjadi tanda untuk menggambarkan identitas pemilikinya [7], [8].

Dengan posisi yang dimilikinya, pemegang kuasa dapat membuat bangunan sesuai kehendak mereka atas dasar gagasan dan ideologi yang mereka pegang. Akhirnya setiap lingkungan binaan yang dibuat tidak hanya memiliki dimensi fungsional semata, tetapi juga mengandung makna dan identitas tertentu yang dipenuhi dengan simbol [9], [10]. Hal tersebut menjelaskan bahwa arsitektur bisa menjadi alat untuk melambangkan identitas kelompok atau kekuatan penguasa. Simbol itu direpresentasikan dalam wujud gedung atau monumen baru di ruang kota [6], [8], [11]. Dengan demikian, seorang penguasa bisa menentukan identitas yang ingin dicitrakan pada wilayahnya [9].

Penggunaan arsitektur sebagai alat kekuasaan pun lazim ditemui di banyak kasus di seluruh dunia, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten hasil pemekaran tahun 1999. Di bawah kepemimpinan Bupati Annas Maamun (2006-2014), Rokan Hilir dibangun dengan identitas baru yang justru tidak menerapkan nilai kelokalan Melayu yang sudah ada. Oleh karena itu, tulisan ini hendak memaparkan proses pembangunan identitas di Rokan Hilir yang dipengaruhi oleh selera sang penguasa daerah.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersumber pada pengumpulan arsip, berita, dan dokumen terkait Kabupaten Rokan Hilir dari awal pemekaran wilayah hingga tahun 2014. Penelitian ini juga bersifat *narrative research* yang berangkat dari paradigma *Theory of Practice* (1977) yang diungkap oleh teoris Pierre Bourdieu [12].

Hubungan kekuasaan dalam masyarakat didasarkan pada kepemilikan sumber daya dan kuasa [12]. Pendekatan ini mempertimbangkan bahwa setiap kelas sosial saling berkaitan dan membentuk interaksi. Penempatan kelas tersebut didasarkan pada modal (*capital*) yang dimiliki seseorang. Istilah modal ini merujuk pada segala yang dapat dilipatgandakan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik dalam hal

ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, termasuk mendapatkan posisi tinggi di masyarakat [12].

Modal terdiri atas empat bentuk, yakni: (i) modal ekonomi, (ii) modal budaya, (iii) modal sosial, dan (iv) modal simbolis [12]. Jika seseorang dapat memaksimalkan tiga modal yang pertama, maka individu tersebut akan mendapatkan modal simbolis yang akan menempatkan dirinya pada suatu tatanan kelas yang baik. Posisi itulah yang akan mengantarkannya untuk berperan dalam menentukan pembangunan, termasuk mengambil kebijakan dalam pembentukan identitas wilayah yang dikuasainya. Akhirnya, gagasan dan selera (*taste*) penguasa pun dapat termanifestasi dalam lingkungan binaan berskala kota. Berdasarkan teori tersebut, tulisan ini hendak mengungkap bagaimana fenomena pembentukan identitas yang terjadi pada salah satu wilayah hasil pemekaran pada era Pasca-Reformasi dengan mengambil studi kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

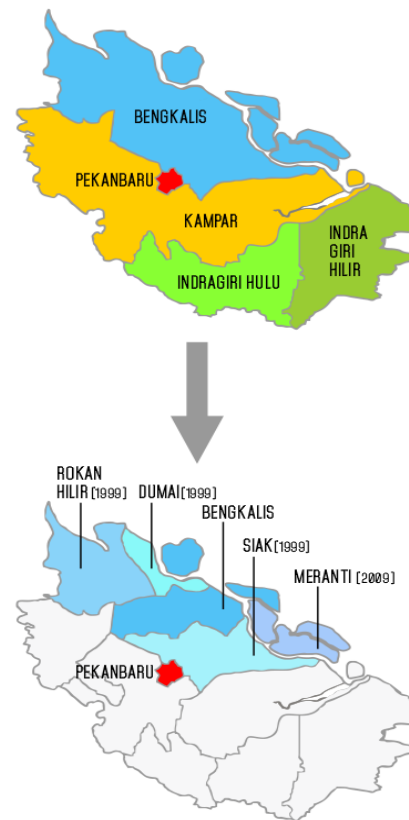
Hasil dan Pembahasan

Rokan Hilir merupakan wilayah Provinsi Riau yang berada di bagian pesisir timur Sumatra dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dengan total penduduk mencapai 714.497 yang didominasi oleh warga bersuku Melayu [13]. Pada masa kolonialisme Belanda, daerah ini dikenal sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia pada tahun 1928, tepatnya di Bandar Bagansiapiapi [14]. Wilayah Rokan Hilir sendiri adalah bagian dari Kerajaan Siak Sri Indrapura yang menjadi pusat kebudayaan Melayu di Sumatra, khususnya Riau. Setelah bergabung dengan Indonesia, wilayah kekuasaan kesultanan pun melebur menjadi Kabupaten Bengkalis di bawah administrasi Provinsi Riau sejak 1957, dapat dilihat pada gambar 1.

Pasca Reformasi 1998, terjadi pemekaran tujuh kabupaten/kota baru di Provinsi Riau (salah satunya Rokan Hilir). Empat kecamatan bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang pernah memiliki identitas maritim yang kuat ini pun ditetapkan sebagai kabupaten baru bernama Rokan Hilir. Namun, identitas tersebut kian memudar seiring dengan menurunnya hasil produksi ikan di masa sekarang.

Setelah menjadi wilayah administrasi baru, pemerintah daerah setempat berupaya mencari identitas lain yang dapat merepresentasikan Rokan Hilir. Di bawah kepemimpinan Bupati Annas Maamun, julukan “Negeri Seribu Kubah” pun dipilih sebagai

identitas baru untuk menggantikan dua identitas lama yang dimiliki Rokan Hilir: sebagai kota penghasil ikan dan juga wilayah kebudayaan Melayu.



Gambar 1. Pembagian wilayah Riau pada 1957 (atas) dan setelah desentralisasi/otonomi daerah (bawah). Pada 1999, Bengkalis dimekarkan menjadi empat daerah otonomi, salah satunya Kabupaten Rokan Hilir.

Lewat kebijakan Maamun, Kabupaten Rokan Hilir mengganti berbagai bangunan pemerintahan lama yang umumnya memiliki atap khas bangunan Melayu dengan bangunan dengan beratap kubah besar berwarna putih. Hal ini berangkat dari ketertarikan Bupati Annas Maamun terhadap arsitektur Turki yang menjadi inspirasinya, meski tampilan bangunan pemerintahan di Rokan Hilir lebih mirip dengan tampilan neoklasik yang ada di Eropa dan Amerika Serikat [15]. Atas ide Maamun pula, pada tahun 2006 dibuatlah kawasan pusat pemerintahan khusus di muara Sungai Rokan yang diberi nama Kompleks Perkantoran Batu Enam Bagansiapiapi. Kawasan ini dikembangkan sebagai kota terpadu yang terdiri atas pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, serta pendidikan dan wisata.

Ketika terpilih sebagai bupati pada 2006, Annas Maamun berupaya untuk membangun ulang identitas

daerah yang sebelumnya dikenal sebagai daerah penghasil ikan. Identitas maritim tersebut dinilai perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan masa sekarang. Bupati Annas Maamun menilai bahwa identitas daerah memiliki peran penting dalam menunjukkan eksistensi daerah sekaligus meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya. Beliau memilih tema “Negeri Seribu Kubah” sebagai identitas baru yang didasari oleh ketertarikan beliau terhadap arsitektur di Turki, khususnya bangunan-bangunan yang berada di Istanbul. Melalui media massa, beliau mengungkapkan bahwa ketertarikan itu bermula saat ia sedang membaca buku yang menampilkan bangunan-bangunan di Istanbul saat ia sedang berada di ruang tunggu bandara [16]. Beliau menganggap bahwa kubah adalah identitas yang menggambarkan arsitektur Islam dan dinilai sesuai dengan Rokan Hilir yang mayoritas adalah masyarakat beragama Islam:

"Itu Vatikan Roma, meniru Istanbul. Lalu, Gedung Putih itu juga meniru Istanbul. Jadi saya terinspirasi dari situ (Istanbul), yang merupakan (ciri khas) Kerajaan Islam. Cantiklah jadinya," kata Annas Maamun [16].

Annas Maamun mewujudkan identitas tersebut dengan merenovasi seluruh bangunan pemerintahan dan menambahkan kubah pada bagian atasnya. Tidak hanya itu, Maamun juga membangun kawasan pemerintahan baru sesuai dengan ide dan selernya terhadap arsitektur, yakni menggunakan kubah. Alhasil, kawasan pemerintahan Batu Enam Bagansiapiapi yang diresmikan pada 2009 pun menjadi tempat eksperimen Maamun untuk membangun identitas Rokan Hilir yang hendak diusungnya. Alhasil, seluruh bangunan instansi (tidak kurang dari tiga puluh kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang ada di Rokan Hilir dibuat seragam: putih semburat warna emas, berkolom-kolom besar, dan ditutup dengan atap kubah.

Bangunan terbesar dan paling mencolok adalah Kantor Bupati, dapat dilihat pada gambar 2 [17], [18]. Dari bagian kubah kemuncak atap dan keberadaan pilar-pilar berwarna putih, bangunan ini sangat mengingatkan kita dengan bangunan Capitol Building yang berada di Amerika Serikat. Kesamaan ini didapatkan dari bentuknya yang simetri bilateral, memiliki kolom tinggi yang terekspos pada fasad, serta kubah yang terdiri atas beberapa tingkat yang ditopang pilar keliling. Kubah tersebut jelas berbeda

tampilannya dengan kubah arsitektur Turki yang menjadi rujukan Annas Maamun, mengingat pertemuan struktur kubah Timur Tengah akan menempel langsung dengan plat dak betonnya. Cita rasa tampilan Amerika yang kental terhadap bangunan Kantor Bupati Rokan Hilir ini semakin diperkuat dengan adanya sosok patung burung elang di depan jalanan bangunan tersebut.



Gambar 2. Bangunan Kantor Bupati Rokan Hilir yang lekat dengan kesan Gedung Capitol di Amerika Serikat lantaran tampilan fasad dan patung elang pengisi lanskap [17], [18].

Selain mengambil inspirasi bentuk kubah dari Amerika Serikat, gedung instansi pemerintahan daerah yang berada di Batu Enam juga mengambil tampilan gaya Neoklasik Eropa yang identik dengan penggunaan kubah dengan adanya *portico* yang ditopang kolom-kolom besar pada bagian fasad. Namun, dari pengamatan tampilan bangunan yang dilakukan, bangunan pemerintahan yang didirikan di sana terlihat hanya mengimitasi wujud fisiknya saja tanpa menggunakan prinsip gayanya. Contohnya pada gedung Dinas Pendidikan dan gedung Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi yang terdapat pada gambar 3. Pada fasad bangunan tersebut, jumlah pilar yang menyangga *portico* berjumlah lima atau memiliki angka ganjil. Tentunya penerapan kolom ini tidak sesuai dengan kaidah arsitektur neoklasik yang mengedepankan prinsip keindahan, salah satunya dari kesimetrisan.

Ambiguitas lain juga terlihat pada gedung Dinas Tenaga Kerja yang terlihat pada gambar 3 [19]–[25], di mana bangunan beratap pelana tersebut ditambahkan dengan kolom dan kubah besar pada sisi bagian pintu masuknya. Selain itu, bila beberapa bangunan pemerintahan yang terdapat di kawasan Batu Enam disejajarkan, akan terlihat bahwa tidak ada satu langgam bentukan kubah yang sama antara satu bangunan dengan yang lainnya, baik dari segi bentuk, warna, hingga proporsi diameter, lebar, dan tinggi.

Hal ini mengindikasikan bahwa identitas “Seribu Kubah” yang diterapkan atas titah dan selera Maamun ini tidak memiliki arah atau pakem yang jelas. Selama

bangunan tersebut memiliki rongga setengah bola yang ditambahkan di atas bangunan (baik besar maupun kecil, di tengah maupun pinggir), gedung tersebut sudah sesuai dengan selera Sang Bupati. Adapun kesamaan tema tampilan yang terlihat di kompleks pemerintahan tersebut justru hanya di warna fasad bangunan yakni putih.



Gambar 3. Kolase kantor pemerintahan di Batu Enam Kabupaten Rokan Hilir. [19]-[25]

Bangunan-bangunan yang berada di kawasan Batu Enam Bagansiapiapi merupakan hasil kurasi yang dilakukan sesuai selera (*taste*) Annas Maamun sang kepala daerah. Maamun yang menyukai bangunan berkubah (tanpa memandang asal-usulnya: dari Eropa, Amerika, atau Timur Tengah) pun mendorong visi yang dimilikinya agar bisa diwujudkan. Lewat kekuasaan politik yang dipegangnya, Maamun dapat membuat keputusan untuk membangun impiannya,

tentunya dengan melakukan lobi politik terhadap kekuatan legislatif dan juga masyarakat.

Di sinilah modal sosial berperan secara maksimal. Masyarakat di Rokan Hilir pada saat itu tidak melakukan penolakan terhadap ide Annas Maamun, bahkan suara Annas Maamun dalam pilkada melonjak drastis dari yang semula 68.911 suara (34.64%) di Pilkada 2006 menjadi 128.513 (52,4%) pada 2011. Dengan dukungan yang besar ini, kesempatan Annas Maamun untuk menggunakan arsitektur dan lingkungan binaan sebagai alat politik di Rokan Hilir pun menjadi lebih mudah, sampai-sampai julukan “Negeri Seribu Kubah” menjadi slogan yang selalu disematkan kepada Rokan Hilir hingga sekarang.

Kecintaannya terhadap kubah juga mempengaruhi kebijakan Maamun saat memenangkan Pilkada Riau 2014 dan menjabat sebagai gubernur. Annas Maamun berencana merenovasi kantor gubernur dengan menambahkan bentuk kubah pada bagian kemuncaknya [26] seperti pada gambar 4 [16], [27]. Tidak hanya itu, Maamun juga membuat peraturan yang mengharuskan setiap bangunan pemerintahan di Riau memiliki unsur kubah, setidaknya pada gerbang masuk bangunan pemerintahan. Berbeda dengan yang respons yang didapat pada saat di Rokan Hilir, kebijakan Maamun sebagai Gubernur Riau justru menuai protes masyarakat dan menimbulkan kontroversi. Hal ini terjadi lantaran bertolak belakang dengan visi masyarakat adat yang ingin menjadikan Riau sebagai pusat bagi kebudayaan Melayu di dunia. Dengan adanya kebijakan penggunaan kubah yang hendak diterapkan ke seluruh kabupaten di Provinsi Riau, secara tidak langsung citra kebudayaan Melayu yang sudah dipertahankan dan diupayakan sejak awal oleh pemerintah sebelumnya akan terganggu.



Gambar 4. Bangunan Kantor Gubernur Riau yang hendak diganti atapnya atas perintah Maamun saat menjabat gubernur. (Kiri) atap eksisting, (kanan) visualisasi. [16], [27]

Baru tujuh bulan menjabat, Annas Maamun ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan suap [28]. Alhasil, pandangan dan rencananya terhadap “kubah-isasi” kantor

pemerintahan berskala provinsi yang diteruskannya dari Rokan Hilir pun tidak sempat terlaksana.

Kesimpulan

Pencarian dan penerapan identitas baru yang diusung di Kabupaten Rokan Hilir merupakan fenomena yang menarik untuk dipelajari. Dari studi kasus yang dilakukan, kita dapat melihat bagaimana elite politik daerah dapat memainkan peranan sangat besar, berbeda pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang ditentukan oleh keputusan pemimpin dari pusat (Jakarta). Fenomena ini muncul sebagai akibat dari dibukanya keran desentralisasi oleh pemerintah pusat, sehingga selera sang penguasa akan termanifestasi dalam wujud arsitektur berskala kota.

Ibarat cendawan di musim hujan, fenomena penggunaan referensi kubah pada bangunan pemerintahan juga merebak pada wilayah lain di Indonesia pascareformasi dan pemekaran wilayah. Beberapa contoh kantor pemerintahan yang menggunakan kubah bergaya Eropa/ Amerika antara lain kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Bone Bolango, Polewali Mandar, Banggai (Sulawesi), Kepahiang (Sumatra), Lombok Utara, dan Lombok Barat (NTB). Adapun kantor pemerintahan yang menggunakan kubah dengan inspirasi Timur Tengah antara lain Kabupaten Aceh Utara, Aceh Barat, Pidie Jaya (Sumatra), Bima, dan Kabupaten Lombok Tengah (NTB). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa keleluasaan yang diberikan melalui otonomi daerah dapat mendorong setiap wilayah di Indonesia untuk membentuk sendiri citra daerahnya melalui kekuatan politik penguasanya.

Sebagai elite yang memiliki kuasa atas modal yang dimilikinya, seorang pemimpin daerah dapat mendorong selera atau *taste* yang dimilikinya kepada masyarakat yang sedang ia pimpin. Dalam studi kasus di Rokan Hilir, Annas Maamun dapat “menciptakan” kota yang sesuai dengan visualisasinya terhadap identitas Rokan Hilir yang baru. Annas Maamun mewujudkan utopia negeri seribu kubah yang sesuai dengan nilai keislaman Melayu dengan membangun gedung pemerintahan berdasarkan selernya—berkat modal dan posisi yang dimilikinya. Pemaksimalan modal ini bisa dilihat dari bagaimana sosok Mantan Bupati Annas Maamun dapat terpilih sebagai bupati untuk dua periode, bahkan melanggengkan jalannya menuju kursi Gubernur Riau pada 2014.

Posisi strategis inilah yang membuatnya berkuasa untuk memanifestasikan ketertarikannya terhadap arsitektur kubah ke dalam gedung-gedung dan kompleks pemerintahan. Apabila individu tersebut tidak memiliki modal sosial yang kuat, sudah pasti keputusan yang dibuatnya akan ditentang secara besar-besaran. Namun, berkat modal sosial yang kuat, visi Annas Maamun akhirnya dapat terwujud, meski strategi yang sama tidak bisa dilakukannya pada skala yang lebih luas saat menjabat sebagai gubernur.

Dengan desentralisasi dan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, elite individu skala lokal dapat memaksimalkan modal (*capital*) yang dia miliki (baik secara ekonomi, budaya, sosial, bahkan simbolis untuk memperebutkan kekuasaan). Salah satu contohnya adalah Annas Maamun yang mewujudkan visi negeri kubahnya di daerah yang dikuasainya.

Hubungan antara selera arsitektur, identitas, dan penguasa pada masa desentralisasi di Indonesia pun muncul dalam bentuk dua mata pisau: pada satu sisi, hal ini dapat menjadi eksperimen yang eksploratif dan menghadirkan kebaruan identitas pada suatu wilayah. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, identitas baru ini juga dapat mengancam keterakaran identitas wilayah setempat.

Pada akhirnya, proses pencarian identitas arsitektur suatu wilayah adalah strategi yang harus dilakukan secara bijak dan penuh dengan kehati-hatian. Apabila tidak demikian, kehadiran identitas baru dalam wujud asing tersebut justru dapat berdampak negatif terhadap pudarnya nilai budaya asli dan latar belakang sejarah yang telah dimiliki oleh wilayah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- [1] A. Kusno, *Zaman Baru Generasi Modernis: Sebuah Catatan Arsitektur*. 2012.
- [2] M. N. Widyarta, *Mencari Arsitektur Sebuah Bangsa: Sebuah Kisah Indonesia*, 1 ed. Surabaya: Wastu Lanas Grafika, 2007.
- [3] K. R. Kurniawan, “DINAMIKA ARSITEKTUR INDONESIA DAN REPRESENTASI ‘POLITIK IDENTITAS’ PASCA REFORMASI,” *NALARs*, vol. 17, no. 1, hal. 65, Jan 2018, doi: 10.24853/nalars.17.1.65-78.
- [4] K. Kurniawan, “Paradox: Sebuah Naratif Tentang Arsitektur dan Urbanisme di Indonesia Pasca Reformasi,” 2014.
- [5] I. Sudrajat, “A study of Indonesian architectural history,” The University of Sydney, 1991.

- [6] H. Gurdalli dan U. Koldas, "Architecture of Power and Urban Space in a Divided City: A History of Official Buildings in Nicosia/Lefkoşa," *Des. J.*, vol. 18, no. 1, hal. 135–157, Mar 2015, doi: 10.2752/175630615X14135446523387.
- [7] T. Markus, *What Do Buildings Have To Do With Power? Architectural Design: The Power of Architecture*. Cambridge: VCH Publisher, 1995.
- [8] A. S. Ismail dan E. N. Zhaharin, "Built Form Properties as Sign and Symbols of Patron Political Ideology," *J. Kejuruter.*, vol. 29, no. 2, hal. 87–96, Des 2017, doi: 10.17576/jkukm-2017-29(2)-04.
- [9] D. Light dan C. Young, "Urban space, political identity and the unwanted legacies of state socialism: Bucharest's problematic Centru Civic in the post-socialist era," *Natl. Pap.*, vol. 41, no. 4, hal. 515–535, Jul 2013, doi: 10.1080/00905992.2012.743512.
- [10] R. D. Aprilian, "Medan Merdeka Jakarta sebagai Arena Kontestasi Kekuasaan melalui Arsitektur dan Pemaknaan Tempat: Kajian Historis Periode 1945–2020," Institut Teknologi Bandung, 2021.
- [11] L. Vale, *Architecture, Power and National Identity*, 2nd ed. London: Routledge, 2008.
- [12] P. Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press, 1977.
- [13] BPS, *Kabupaten Rokan Hilir dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Witra, 2021.
- [14] Wahidin, "Potret Kerukunan Masyarakat Etnis Melayu-China dalam Bingkai Negeri Seribu Kubah Kabupaten Rokan Hilir," *Huk. Islam*, vol. 16, no. 1, hal. 94–103, 2016.
- [15] R. Y. Varios, "Ternyata Ide Kubah Kantor Gubernur Riau Didapat Annas Maamun dari Buku," *GoRiau.com*, Apr 2014. <https://www.goriau.com/berita/baca/ternyata-ide-kubah-kantor-gubernur-riau-didapat-annas-maamun-dari-buku.html> (diakses Jul 22, 2022).
- [16] R. Headline, "Biar Tidak Bocor Alasan Gubernur Riau Suka Bangunan Berkubah," *Riauheadline.com*, 2014. <https://riauheadline.com/Sosial/Biar-Tidak-Bocor-Alasan-Gubernur-Riau-Suka-Bangunan-Berkubah> (diakses Jul 22, 2022).
- [17] Amrial, "Kantor Bupati Rohil Ternyata tak Sesuai DED, Ini Ketinggian yang Direkomendasikan," *GoRiau.com*, 2015. <https://www.goriau.com/berita/baca/kantor-bupati-rohil-ternyata-tak-sesuai-ded-ini-ketinggian-yang-direkomendasikan.html> (diakses Jul 27, 2022).
- [18] Pemkab, "Bupati Rokan Hilir H Suyatno di Sebut-Sebut Berhasil Dalam Pembangunan," *wawasanriau.com*, 2015. <https://wawasanriau.com/mobile/detailberita/399/bupati-rokan-hilir-h-suyatno-di-sebut--sebut-berhasil-dalam-pembangunan.html> (diakses Jul 27, 2022).
- [19] Jum, "Gedung Putih DPRD Kab Rokan Hilir (Riau) Tak Juga Ditempati, Ini Alasan Ketua DPRD Nasruddin Hasan," *riaupublik.com*, 2017. <https://www.riaupublik.com/2017/05/gedung-putih-dprd-kab-rokan-hilir-riau.html> (diakses Sep 05, 2022).
- [20] Syafri, "Kasi Intel Kejaksaaan Negeri Rohil Tolak Temui Wartawan," *pantauriau.com*, 2020. <https://pantauriau.com/news/detail/14589/kasi-intel-kejaksaaan-negeri-rohil-tolak-temui-wartawan> (diakses Jul 27, 2022).
- [21] Dinsosrohil, "No Title," *Dinsosrohil.blogspot.com*, 2015. <http://dinsosrohil.blogspot.com/> (diakses Jul 27, 2022).
- [22] E. Susilo, "Nur Hidayat : Tanpa Dukungan, Program Ini Akan Sia-Sia," *kabarheadline.com*, 2020. <https://kabarheadline.com/read/detail/5470/nur-hidayat--tanpa-dukungan-program-ini-akan-siasia> (diakses Jul 27, 2022).
- [23] Y. Faisal, "Hingga Akhir Oktober, Jumlah Pencari Kerja di Rohil Capai 1.677 Orang," *gonews.co*, 2019. <https://www.gonews.co/berita/baca/2019/10/30/hi-ingga-akhir-oktober-jumlah-pencari-kerja-di-rohil-capai-1677-orang> (diakses Sep 05, 2022).
- [24] kepemudaan D. O. K. R. H. Dinas Pariwisata, "Facebook Dinas Pariwisata,kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir," *facebook.com*, 2022. <https://web.facebook.com/photo/?fbid=389949516467967&set=a.389949469801305> (diakses Jul 27, 2022).
- [25] Rozi, "Bupati Rokan Hilir Resmikan Kantor Penghulu Sungai Kubu," *baranewsaceh.co*, 2020. <https://baranewsaceh.co/bupati-rokan-hilir-resmikan-kantor-penghulu-sungai-kubu7/> (diakses Jul 27, 2022).
- [26] Antara, "Annas Gagas Kubah Kantor Gubernur Riau," *Antara News*, 2014. <https://riau.antaraneews.com/berita/33634/annas-gagas-kubah-kantor-gubernur-riau> (diakses Jul 27, 2022).
- [27] R. Y. Varios, "Keren! Kubah Kantor Gubernur Riau Terealisasi Melalui APBD Perubahan 2014," *GoRiau.com*, 2014. <https://www.goriau.com/berita/baca/keren-kubah-kantor-gubernur-riau-terealisasi-melalui-apbd-perubahan-2014.html> (diakses Jul 22, 2022).
- [28] R. Kuswandi, "Gubernur Annas Maamun Dituntut 6 Tahun Penjara," *Kompas.com*, 2015. <https://regional.kompas.com/read/2015/05/25/12304701/Gubernur.Annas.Maamun.Dituntut.6.Tahun.Penjara> (diakses Jul 27, 2022).